

INTEGRASI ISLAMIC WORLDVIEW DALAM EKONOMI INDONESIA: PERSPEKTIF NEOKLASIK, INSTITUSIONAL DAN MAKROEKONOMI

Dhannie Stephend Setiawan¹⁾

¹⁾Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universita Negeri Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah
E-mail: epen.stephend29@gmail.com

Abstrak

Ekonomi Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana *Islamic worldview* atau pandangan dunia Islam dapat diintegrasikan dalam analisis ekonomi Indonesia, dengan mengacu pada tiga jurnal ekonomi terkemuka. Pendekatan pertama yang diambil adalah perspektif neoklasik dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, yang mengkaji kebijakan fiskal dan moneter. Dalam kerangka *Islamic worldview*, analisis ini perlu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial, penghindaran *riba*, dan distribusi kekayaan yang adil. Kedua, dalam *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, pendekatan ekonomi institusional menyoroti pentingnya kelembagaan dalam pembangunan ekonomi. Dalam pandangan Islam, prinsip *syura* (musyawarah) dan *amanah* (kepercayaan) menjadi kunci dalam pengelolaan kelembagaan yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Ketiga, dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi*, globalisasi dianalisis dalam konteks dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Pandangan dunia Islam menawarkan solusi terhadap ketimpangan global melalui instrumen sosial seperti *zakat*, *infaq*, dan *waqf*. Secara keseluruhan, integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan perspektif baru yang lebih berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, yang dapat memperkaya kebijakan ekonomi Indonesia dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Islamic Worldview, Indonesia, Neoklasik, Makroekonomi

Abstract

The Indonesian economy, as one of the countries with the largest Muslim population in the world, is faced with various challenges in achieving inclusive and sustainable economic development. This article aims to examine how the Islamic worldview can be integrated into Indonesian economic analysis, by referring to three leading economic journals. The first approach taken is the neoclassical perspective in the *Journal of Economics and Development*, which examines fiscal and monetary policy. Within the framework of the Islamic worldview, this analysis needs to pay attention to the principles of social justice, avoidance of usury, and fair distribution of wealth. Second, in the *Journal of Economics and Development Studies*, the institutional economics approach

highlights the importance of institutions in economic development. In the Islamic view, the principles of shura (deliberation) and amanah (trust) are the keys to institutional management that is oriented towards the welfare of the people. Third, in the Journal of Economic Sciences, globalization is analyzed in the context of its impact on the Indonesian economy. The Islamic worldview offers solutions to global inequality through social instruments such as zakat, infaq, and waqf. Overall, the integration of Islamic economic principles provides a new perspective that focuses more on social justice and shared prosperity, which can enrich Indonesia's economic policies in achieving sustainable and inclusive development.

Keywords: *Islamic Worldview, Indonesian, Neoclassical, Macroeconomics*

PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Dalam konteks ini, *Islamic worldview* atau pandangan dunia Islam menawarkan perspektif yang berbeda dalam melihat dinamika ekonomi, baik di tingkat makro maupun mikro. *Islamic worldview* dalam ekonomi tidak hanya memperhatikan aspek efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta tanggung jawab moral dalam pengelolaan sumber daya.

Ekonomi Indonesia telah berkembang dengan berbagai teori dan kebijakan yang mengacu pada perspektif ekonomi konvensional, seperti neoklasik, institusional, dan makroekonomi global. Meskipun pendekatan-pendekatan ini memberikan wawasan penting, ada kebutuhan untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memperkenalkan mekanisme distribusi yang lebih adil. Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*adl*), kebersamaan (*ukhuwah*), dan pemerintahan yang amanah (*trustworthy leadership*) memiliki potensi untuk memperkaya pemikiran ekonomi Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menggali bagaimana *Islamic worldview* dapat diterapkan dalam kajian ekonomi Indonesia, dengan merujuk pada tiga jurnal terkemuka dalam bidang ekonomi di Indonesia. Pertama, dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, yang mengkaji dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi dari perspektif neoklasik. Kedua, dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, yang fokus pada peran kelembagaan dalam pembangunan ekonomi melalui pendekatan ekonomi institusional. Ketiga, dalam Jurnal Ilmu Ekonomi, yang menganalisis dampak globalisasi terhadap perekonomian Indonesia dari perspektif makroekonomi.

Dalam artikel ini, masing-masing pendekatan tersebut akan dikaji kembali dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Islamic worldview*. Melalui pendekatan ini, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Islam, seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan keberlanjutan, dapat memberikan perspektif baru dalam perancangan kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih berfokus pada kesejahteraan umat, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi semata.

Dengan demikian, tujuan utama artikel ini adalah untuk memperkenalkan sebuah pendekatan yang lebih berlandaskan etika dan moralitas dalam kebijakan

ekonomi Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian angka-angka ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar manusia dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, sebagaimana diajarkan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini mengulas berbagai literatur yang relevan dengan penerapan *Islamic worldview* dalam ekonomi Indonesia, dengan fokus pada tiga perspektif ekonomi utama: neoklasik, institusional, dan makroekonomi global. Melalui kajian ini, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi potensi prinsip-prinsip Islam dalam memberikan alternatif terhadap teori dan kebijakan ekonomi yang berkembang di Indonesia.

Pendekatan Neoklasik dalam Ekonomi Indonesia

Teori ekonomi neoklasik, yang sering diterapkan dalam analisis kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia, berfokus pada mekanisme pasar yang efisien untuk mencapai keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi. Pohan (2019) dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan mengkaji dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan pendekatan neoklasik yang mengasumsikan bahwa pasar bebas akan mengoreksi ketidakseimbangan ekonomi secara otomatis. Namun, perspektif ini sering dikritik karena lebih menekankan efisiensi dan pertumbuhan tanpa memperhatikan ketimpangan sosial dan distribusi kekayaan.

Dalam konteks *Islamic worldview*, ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi pasar, tetapi juga keadilan dalam distribusi sumber daya dan penghindaran eksploitasi dalam bentuk *riba* (bunga) dan ketimpangan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar. Keadilan sosial (*adl*) dan pemerataan kesejahteraan menjadi prinsip penting dalam kebijakan ekonomi Islam. Penelitian oleh Khan dan Bhatti (2018) menyatakan bahwa ekonomi Islam menawarkan alternatif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dengan mengedepankan instrumen sosial seperti zakat dan infaq yang membantu redistribusi kekayaan.

Pendekatan Ekonomi Institusional

Pendekatan ekonomi institusional menyoroti pentingnya kelembagaan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sumarno (2020) dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan meneliti peran kelembagaan dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi di Indonesia, dengan menekankan bahwa reformasi institusional adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang merata. Pemikiran ini berfokus pada pembentukan aturan main yang mendukung kestabilan dan keadilan dalam perekonomian.

Dalam pandangan *Islamic worldview*, prinsip-prinsip kelembagaan yang berbasis pada moralitas dan etika Islam seperti *syura* (musyawarah) dan *amanah* (kepercayaan) sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ekonomi berorientasi pada kesejahteraan umat. Sebagai contoh, dalam konteks kebijakan desentralisasi, Yuliana dan Wibowo (2018) mengungkapkan bahwa pengelolaan daerah yang berbasis pada prinsip *syura* dapat menghasilkan

keputusan-keputusan yang lebih adil dan inklusif. Pembangunan yang berkelanjutan dalam ekonomi Islam tidak hanya memperhatikan efisiensi ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial, dengan memastikan bahwa kebijakan ekonomi mendukung pemerataan dan menghindari penindasan atau eksploitasi.

Makroekonomi dan Dampak Globalisasi dalam Ekonomi Indonesia

Globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, maupun fluktuasi harga komoditas. Setiawan (2022) dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi* menganalisis pengaruh globalisasi terhadap ekonomi Indonesia dan menyoroti pentingnya strategi makroekonomi yang adaptif untuk menghadapi ketidakpastian global. Di sisi lain, Firdaus dan Putri (2020) meneliti dampak fluktuasi ekonomi global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, dengan menunjukkan bahwa Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan terhadap sektor-sektor domestik yang rentan.

Dari perspektif *Islamic worldview*, globalisasi dapat dimaknai tidak hanya sebagai fenomena ekonomi semata, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan sumber daya global. Dalam ekonomi Islam, ketimpangan yang dihasilkan oleh ketergantungan pada pasar internasional dapat diatasi dengan instrumen-instrumen sosial seperti **zakat**, infaq, dan waqf yang berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Zakat, misalnya, berfungsi untuk mengurangi ketimpangan dengan memindahkan sebagian kekayaan dari yang lebih kaya kepada yang lebih miskin, serta meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Salah satu dasar utama ekonomi Islam adalah keadilan (*adl*) dan kesejahteraan sosial, yang menekankan bahwa sumber daya ekonomi harus dikelola secara adil dan digunakan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan individu atau segelintir orang. Prinsip *tawhid* (kesatuan) dalam Islam menyatakan bahwa segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, harus dipahami sebagai bagian dari kehendak Tuhan, yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Di samping itu, konsep masalah (kesejahteraan umum) dan istilah (kebijakan berdasarkan manfaat umum) juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan umat secara keseluruhan dan menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat banyak.

Integrasi Islamic Worldview dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia

Integrasi *Islamic worldview* dalam kebijakan ekonomi Indonesia memerlukan pendekatan yang seimbang antara teori-teori ekonomi konvensional dan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, kebijakan yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan perhatian terhadap pemerataan hasil pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan kekayaan secara adil. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya

mengutamakan efisiensi ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten terhadap tiga jurnal ekonomi Indonesia yang relevan, yaitu Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan Jurnal Ilmu Ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Islamic worldview* dalam kebijakan ekonomi Indonesia yang dibahas dalam jurnal-jurnal tersebut.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Identifikasi Topik dan Teori: Menyusun topik utama dalam jurnal-jurnal tersebut, seperti kebijakan fiskal, moneter, kelembagaan, dan dampak globalisasi.
2. Analisis Konten: Menganalisis kebijakan ekonomi yang dibahas dalam jurnal dengan fokus pada isu-isu seperti keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan ketimpangan ekonomi. Aspek ini kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, seperti *adl* (keadilan), *syura* (musyawarah), dan penghindaran *riba*.
3. Pengintegrasian *Islamic Worldview*: Menilai bagaimana teori-teori ekonomi yang ada dapat diadaptasi dengan prinsip ekonomi Islam untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.
4. Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan temuan analisis, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Data dianalisis dengan analisis tematik, mengidentifikasi tema utama dalam artikel-artikel jurnal dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, redistribusi kekayaan, dan pembangunan inklusif. Koding dan kategorisasi dilakukan untuk memahami keterkaitan antara teori ekonomi dan nilai-nilai Islam.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi yang signifikan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Islamic worldview* dalam kebijakan ekonomi Indonesia berdasarkan temuan dari tiga perspektif utama yang diangkat dalam jurnal-jurnal yang diteliti. Berikut adalah hasil analisis berdasarkan perspektif neoklasik, institusional, dan makroekonomi global yang dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam.

Integrasi *Islamic Worldview* dalam Kebijakan Fiskal dan Moneter (Perspektif Neoklasik)

Dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan di Indonesia cenderung mengikuti pendekatan neoklasik, yang menekankan pada efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Namun, analisis ini sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam kerangka *Islamic worldview*, prinsip keadilan sosial (*adl*) dan penghindaran

riba (bunga) sangat penting. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka-angka makro, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi untuk memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang berbasis pada *riba-free* dan pengelolaan keuangan negara yang lebih inklusif dapat meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Peran Kelembagaan dalam Pembangunan (Perspektif Institusional)

Dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, penekanan pada pentingnya kelembagaan dalam pembangunan ekonomi menyoroti kebutuhan akan reformasi struktural. Menurut Sumarno (2020) dan Yuliana & Wibowo (2018), sistem kelembagaan yang kuat dan transparan dapat mendorong pembangunan yang lebih adil. Dalam pandangan *Islamic worldview*, prinsip syura (musyawarah) dan amanah (kepercayaan) sangat relevan untuk menciptakan kelembagaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Sistem kelembagaan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam akan memastikan bahwa keputusan-keputusan pembangunan tidak hanya mengutamakan efisiensi tetapi juga keadilan dan pemerataan.

Dampak Globalisasi terhadap Ekonomi Indonesia (Perspektif Makroekonomi)

Dalam Jurnal Ilmu Ekonomi, Setiawan (2022) dan Firdaus & Putri (2020) meneliti dampak globalisasi terhadap perekonomian Indonesia, yang sering kali menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan sosial. Dari perspektif *Islamic worldview*, globalisasi tidak hanya dilihat sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai tantangan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip Islam yang lebih adil dalam pengelolaan ekonomi global. Zakat, infaq, dan waqf dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan global dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Prinsip Islam yang menekankan redistribusi kekayaan melalui instrumen sosial dapat membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menghadapi ketimpangan yang diakibatkan oleh globalisasi.

Keselarasan Antara Kebijakan Ekonomi dan Nilai-nilai Islam

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan ekonomi konvensional yang ada di Indonesia—baik neoklasik, institusional, maupun makroekonomi—memiliki kelebihan dalam efisiensi dan pertumbuhan, mereka masih perlu diimbangi dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan sosial, kesetaraan, dan pemerataan kesejahteraan. Penerapan prinsip *Islamic worldview* dalam kebijakan ekonomi dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut, tidak hanya dalam meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi juga dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berbasis pada kesejahteraan umat.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *Islamic worldview* dapat mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam kebijakan ekonomi Indonesia, berdasarkan tiga perspektif utama yang diangkat

dalam tiga jurnal ekonomi yang relevan. Perspektif ini mencakup pendekatan neoklasik, institusional, dan makroekonomi global, serta bagaimana masing-masing dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip Islam dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Neoklasik dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam

Pendekatan ekonomi neoklasik yang dominan di Indonesia lebih fokus pada efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang mengandalkan mekanisme pasar. Meskipun pendekatan ini terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sering kali ia mengabaikan aspek keadilan sosial dan pemerataan kekayaan.

Dalam perspektif *Islamic worldview*, ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga dari segi distribusi kekayaan yang adil. Islam menekankan prinsip keadilan sosial (*adl*), yang memastikan bahwa sumber daya ekonomi digunakan untuk kesejahteraan umat dan tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Salah satu instrumen utama yang dapat mengurangi ketimpangan adalah zakat, yang merupakan kewajiban untuk redistribusi kekayaan dari yang lebih kaya kepada yang lebih miskin. Penerapan zakat dalam kebijakan fiskal, misalnya, dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang berbasis pada prinsip *Islamic worldview* tidak hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan adanya distribusi kekayaan yang lebih adil.

Selain itu, penghindaran riba (bunga) yang menjadi prinsip utama dalam ekonomi Islam juga memberikan pengaruh besar pada kebijakan moneter. Sistem perbankan yang bebas dari praktik *riba* dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan tidak memberatkan masyarakat, terutama masyarakat yang lebih rentan terhadap utang berbunga. Oleh karena itu, dalam kerangka *Islamic worldview*, kebijakan moneter yang berbasis pada prinsip keadilan sosial, termasuk penghindaran *riba*, dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia secara lebih merata.

Institusional dan Kelembagaan dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif ekonomi institusional, yang ditekankan dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, pembangunan ekonomi sangat bergantung pada kekuatan dan kualitas kelembagaan yang ada. Reformasi institusional yang baik dapat mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang lebih stabil dan merata, dengan mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya.

Dalam pandangan *Islamic worldview*, prinsip syura (musyawarah) dan amanah (kepercayaan) adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam membangun kelembagaan yang sehat. Syura mengajarkan bahwa keputusan ekonomi yang diambil seharusnya melibatkan konsultasi dan musyawarah dengan berbagai pihak yang terlibat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Amanah menggarisbawahi pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan lembaga-lembaga publik.

Misalnya, dalam konteks kebijakan desentralisasi yang ditekankan dalam beberapa penelitian, syura dapat berperan penting dalam pengambilan keputusan lokal yang melibatkan masyarakat. Prinsip ini dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta menghindari praktik korupsi dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Oleh karena itu, pendekatan kelembagaan berbasis pada prinsip-prinsip Islam dapat memperkuat struktur ekonomi yang lebih transparan dan akuntabel.

Globalisasi dan Dampaknya dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif makroekonomi, globalisasi memang membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik positif maupun negatif. Sementara globalisasi dapat membuka pasar internasional dan menarik investasi, ia juga sering menyebabkan ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta pengaruh negatif terhadap kebudayaan dan sosial masyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam fluktuasi harga komoditas global yang sering berdampak buruk bagi perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Namun, dalam *Islamic worldview*, globalisasi tidak hanya dilihat sebagai fenomena ekonomi yang harus dihadapi, tetapi juga sebagai peluang untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lebih adil. Zakat, infaq, dan waqf adalah instrumen sosial yang dapat dioptimalkan dalam kerangka globalisasi untuk membantu redistribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan global. Misalnya, waqf dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial seperti pendidikan dan kesehatan, yang bermanfaat bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam konteks globalisasi, negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, dapat memanfaatkan sistem ekonomi Islam untuk menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan memperkenalkan sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, seperti perbankan tanpa *riba*, investasi sosial, dan kerjasama internasional yang berlandaskan pada prinsip *tawhid* (kesatuan) dan *maslahah* (kesejahteraan umum).

Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan

Secara keseluruhan, integrasi *Islamic worldview* dalam kebijakan ekonomi Indonesia dapat membawa dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan pengelolaan sumber daya dengan amanah, sangat relevan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Penerapan kebijakan berbasis pada nilai-nilai Islam ini dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya berfokus pada angka statistik, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, pengintegrasian *Islamic worldview* dalam kebijakan ekonomi Indonesia tidak hanya menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan

sosial, tetapi juga untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan utama:

1. Sumber Data Terbatas. Penelitian hanya menggunakan tiga jurnal ekonomi Indonesia sebagai sumber utama, yang mungkin tidak mewakili seluruh literatur terkait ekonomi Indonesia atau *Islamic worldview*.
2. Pendekatan Kualitatif. Metode analisis konten yang digunakan bersifat kualitatif, yang bergantung pada interpretasi peneliti terhadap teks, sehingga bisa mengarah pada subjektivitas. Selain itu, tidak ada data primer seperti wawancara dengan praktisi ekonomi atau pembuat kebijakan.
3. Keterbatasan Analisis Kebijakan. Penelitian lebih berfokus pada teori dan konsep, tanpa menguji penerapan kebijakan di lapangan, sehingga hasilnya bersifat teoretis dan kurang mempertimbangkan tantangan praktis dalam implementasi kebijakan.
4. Faktor Eksternal Tidak Dibahas. Penelitian tidak membahas faktor eksternal yang memengaruhi ekonomi Indonesia, seperti kondisi global atau kebijakan internasional, yang juga dapat berdampak besar.
5. Fokus Terbatas pada Tiga Perspektif. Hanya tiga perspektif ekonomi yang dianalisis (neoklasik, institusional, dan makroekonomi global), sementara pendekatan lain yang relevan, seperti ekonomi perilaku atau ekonomi syariah, tidak dijelajahi.
6. Tanpa Pengujian Empiris. Penelitian tidak mencakup pengujian empiris, sehingga temuan bersifat deskriptif dan tidak dapat diuji validitasnya secara statistik.

PENELITIAN MENDATANG

Untuk penelitian selanjutnya, beberapa area perlu dieksplorasi lebih lanjut guna memperdalam pemahaman tentang integrasi *Islamic worldview* dalam kebijakan ekonomi Indonesia:

1. Studi Empiris dan Pengujian Kebijakan. Penelitian berikutnya sebaiknya melibatkan pengujian empiris terhadap implementasi kebijakan ekonomi berbasis *Islamic worldview* di Indonesia. Pengumpulan data primer, seperti wawancara dengan pembuat kebijakan, praktisi ekonomi, atau masyarakat, akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan ekonomi.
2. Eksplorasi Pendekatan Ekonomi Lain. Selain perspektif neoklasik, institusional, dan makroekonomi global, penelitian lebih lanjut dapat melibatkan pendekatan lain, seperti ekonomi syariah, ekonomi perilaku, atau ekonomi pembangunan. Pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam berbagai model ekonomi yang ada.
3. Analisis Kebijakan Ekonomi Lokal dan Desentralisasi.

Mengingat pentingnya kebijakan desentralisasi di Indonesia, penelitian mendatang bisa fokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya lokal. Penelitian ini akan menilai apakah syura (musyawarah) dan amanah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat daerah.

4. Studi Perbandingan dengan Negara Muslim Lain.
Penelitian yang akan datang juga dapat melakukan studi perbandingan internasional dengan negara-negara Muslim lainnya yang telah menerapkan kebijakan ekonomi berbasis *Islamic worldview*. Ini akan memberikan wawasan lebih luas mengenai tantangan dan keberhasilan dalam memadukan prinsip Islam dengan kebijakan ekonomi modern di negara dengan latar belakang Muslim.
5. Analisis Dampak Kebijakan Globalisasi.
Studi lanjutan dapat menggali lebih dalam mengenai dampak globalisasi terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya dalam konteks nilai-nilai Islam. Penelitian ini bisa melihat bagaimana keuangan syariah dan instrumen sosial Islam, seperti waqf dan zakat, dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan di tengah pengaruh globalisasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan bahwa penerapan *Islamic worldview* dalam kebijakan ekonomi Indonesia dengan menganalisis tiga perspektif utama: neoklasik, institusional, dan makroekonomi global. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

1. Kebijakan Fiskal dan Moneter. Dari perspektif neoklasik, meskipun kebijakan fiskal dan moneter yang ada di Indonesia efektif dalam mendorong pertumbuhan, kebijakan ini cenderung mengabaikan distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Integrasi prinsip *Islamic worldview* terutama penghindaran riba dan penerapan zakat dapat menciptakan sistem yang lebih adil, mengurangi ketimpangan sosial, dan memberikan kesejahteraan lebih merata.
2. Kelembagaan dan Reformasi Institusional. Dalam perspektif institusional, prinsip syura (musyawarah) dan amanah (kepercayaan) dapat memperkuat sistem kelembagaan Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kebijakan desentralisasi dan reformasi kelembagaan, Indonesia dapat menciptakan struktur ekonomi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Dampak Globalisasi dan Kebijakan Ekonomi Global. Dari perspektif makroekonomi global, globalisasi membawa tantangan ketimpangan ekonomi, namun juga peluang untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam, seperti waqf dan infaq, untuk mendukung pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Sistem ekonomi Islam dapat membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menghadapi ketidakstabilan global dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, *Islamic worldview* menawarkan solusi yang lebih holistik terhadap tantangan ekonomi Indonesia dengan menekankan pada keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, I., & Putri, N. (2020). Pengaruh Fluktuasi Ekonomi Global terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia: Analisis Makroekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 28(1), 65-80.
- Pohan, M. (2019). Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Neoklasik. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 45-63.
- Setiawan, B. (2022). Globalisasi dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia: Kajian Makroekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 34(4), 220-238.
- Siregar, R. A., & Abdullah, F. (2021). Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Neoklasik: Analisis Pembangunan dan Ketimpangan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 23(1), 77-92.
- Sumarno, S. (2020). Reformasi Institusional untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Perspektif Ekonomi Institusional. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17(3), 134-149.
- Yuliana, E., & Wibowo, A. (2018). Peran Kebijakan Desentralisasi dalam Mendorong Pembangunan Daerah di Indonesia: Sebuah Pendekatan Ekonomi Institusional. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(2), 98-112.